

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kota Magelang selama tahun 2011-2015 (RPJM Daerah Ke-2) berpedoman kepada perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025. Selain itu juga tidak dapat dipisahkan dari hasil pelaksanaan tahapan pembangunan jangka panjang ke-1 (2005-2010) atau RPJM Daerah pertama. Ini merupakan upaya menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan daerah (*sustainable development*). Substansi visi, misi, sasaran pokok dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025 telah teroperasionalkan skenario implementasinya dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka panjang daerah dengan skala prioritasnya masing-masing. Tahapan-tahapan itu adalah:

1. RPJM Daerah Ke-1 (2005-2010), Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM Daerah ke-1 diprioritaskan untuk meletakkan sendi-sendi pokok sebagai kota jasa yaitu dengan mengupayakan:
 - a. Melengkapi sarana dan prasarana fisik sebagai pendukung penyelenggaraan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
 - b. Penyempurnaan sarana dan prasarana pelayanan dasar;tanpa mengabaikan pembangunan di bidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
2. **RPJM Daerah Ke-2 (2011-2015)**, Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah Ke-1, RPJM Daerah Ke-2 diprioritaskan untuk:
 - a. Mewujudkan Kota Magelang yang berbudaya, maju dan berdaya saing melalui upaya-upaya peningkatan kualitas SDM;
 - b. Memantapkan peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa sebagai pendukung pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
 - c. Memberi pelayanan masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain;tanpa mengabaikan pembangunan di bidang lainnya.
3. RPJM Daerah Ke-3 (2016-2020), Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah Ke-2, RPJM Daerah Ke-3 diprioritaskan untuk:
 - a. Meningkatkan dan memantapkan upaya menyejahterakan masyarakat melalui optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani,

dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;

- b. Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;

tanpa mengabaikan pembangunan di bidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

4. RPJM Daerah Ke-4 (2021-2025), Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah Ke-3, RPJM Daerah Ke-4 diprioritaskan untuk:
 - a. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang;
 - b. Mewujudkan tercapainya perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi, berlandaskan budaya yang unggul, sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri;
 - c. Mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat madani.

Selanjutnya dalam rangka memberikan penekanan dan pedoman dalam penentuan program prioritas pembangunan daerah tahun 2011-2015, perlu disampaikan skala prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kota Magelang tahun 2005-2025, yaitu meliputi:

1. Mewujudkan Kota Magelang sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai.
2. Mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.
3. Mewujudkan daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif didukung oleh penguasaan iptek dan sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Mewujudkan perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan ditandai penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
5. Mewujudkan *good governance* dan *clean government* dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (*civil society*), dan media massa sehingga kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Rumusan tahapan dan skala prioritas pembangunan jangka panjang daerah di atas sangat diperhatikan dan merupakan kesatuan yang utuh dengan rancangan visi,

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2011-2015. Kebijakan umum pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2011-2015 dirumuskan untuk dapat digunakan sebagai fokus dari upaya pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan daerah.

Berikut ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja., serta hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. Penyajian selengkapnya kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2011-2015 dapat dilihat dalam Tabel VII.1. di bawah ini:

Tabel VII.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kota Magelang 2011-2015

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
MISI 1: Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan									
1	1.Meningkatnya pengelolaan administrasi perkantoran dengan baik dan tertib dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional menuju pelayanan publik yang prima	1.Menetapkan standar minimal perlengkapan kantor, penetapan operating prosedur penggunaan peralatan kantor dan standar belanja peralatan kantor serta mengefektifkan implementasi standar-standar tersebut	1.Penyusunan standar minimal perlengkapan kantor, penetapan operating prosedur penggunaan peralatan kantor dan standar belanja peralatan kantor 2.Menegakkan kontrol dan pengendalian manajemen kantor sesuai standar	1.Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran	75%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program pada setiap SKPD	Semua SKPD
				2. Penerapan e-Procurement (LPSE)	0%	100%	Pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa		
				3. Penerapan e-Government yang diukur dari:					
				3.a.Jumlah SKPD	18 SKPD	46 SKPD	Pengembangan	Urusan wajib	Dishubkominfo

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				yang menggunakan Sistem Informasi			komunikasi, informasi, dan media masa	Komunikasi dan Informatika	
				3.b. Jumlah SKPD yang memiliki website	5 SKPD	46 SKPD	Pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa	Urusan wajib Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
				3.b. WAN (Wide Area Network) setiap SKPD	10%	75%	Pengembangan komunikasi, informasi, dan media masa	Urusan wajib Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
				3.c. Penggunaan software legal/ OSS di setiap SKPD	10%	100%	Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi	Urusan wajib Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
				Tersedianya dokumen data/ informasi/ statistik daerah:					
				- Buku Daerah dalam Angka	ada	ada	Pengembangan data/ informasi	Urusan wajib statistik	Kantor Litbang & Statistik
				- Buku PDRB Kota	ada	ada	Pengembangan data/ informasi	Urusan wajib statistik	Kantor Litbang & Statistik
				Persentase SKPD yang melaksanakan arsip baku	35%	100%	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Urusan wajib kearsipan	Kantor Perpus Daerah, Arsip & Dokumentasi Didukung semua SKPD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Peningkatan SDM pengelola kearsipan	25%	50%	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Urusan wajib kearsipan	Kantor Perpus Daerah, Arsip & Dokumentasi Didukung semua SKPD
				Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	35%	100%	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Urusan wajib kearsipan	Kantor Perpus Daerah, Arsip & Dokumentasi Didukung semua SKPD
				Terpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan	20%	85%	Pemeliharaan rutin berkala sarana & prasarana kearsipan	Urusan wajib kearsipan	Kantor Perpus Daerah, Arsip & Dokumentasi Didukung semua SKPD
	2. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, responsive, bertanggungjawab dan akuntabel	1.1.1.Membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel	1.1.2.1. Mengupayakan tertib administrasi keuangan dan pertanggungjawabannya	Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan	WDP	WTP	Peningkatan pengawasan sistem internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat Didukung smeua SKPD
		1.1.2.Penilaian laporan kinerja pemerintah (LAKIP, LPPD, LKPD) yang dinilai sangat baik	11.2.1.Penyediaan laporan kinerja pemerintah daerah tepat waktu	Tingkat capaian kinerja pemerintah kota	Sgt baik	Sgt baik	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program pada setiap SKPD	Setda Di dikung semua SKPD
		1.1.3.Memfasilitasi kelancaran komunikasi	1.1.3.1.Menyediakan sistem informasi publik yang	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Memuaskan	Mengintensifkan penanganan	Urusan wajib Otonomi Daerah,	Setda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan informasi publik antara pemerintah dan publik yang aksesibel bagi semua kelompok untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian penggunaan sumber daya publik	aksesibel oleh publik 1.1.3.2.Membangun sistem pengaduan publik yang aksesibel oleh publik				pengaduan masyarakat	Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
		1.1.4. Kualitas SDM sesuai standar kepegawaian	1.1.4.1. Pengiriman studi lanjut sesuai kebutuhan standar kepegawaian	S1 S2 S3	35,06% 13,56% 0,02%	29,61% 19% 0,02%	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		
	3.Diwujudkannya pelayanan publik cepat, transparan,dan adil	1.1.3. Menetapkan dan Menerapkan standar pelayanan minimal atau standar prosedur yang jelas dan terbuka bagi calon pengguna layanan	1.1.3.1.Penetapan regulasi yang mengatur kewajiban tiap SKPD memiliki Standar prosedur pelayanan dan target standar pelayanan minimal atau standar lainnya sesuai regulasi yang berlaku	Penyederhanaan prosedur pelayanan publik	100%	100%	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setda Didukung smeua SKPD
				Ketersediaan Standar Operasional Prosedur bidang perizinan dan pelayanan umum	100%	100%	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setda
				Penyelesaian aduan masyarakat	100%	100%	Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi	Setda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
				Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	100%	100%	Penataan administrasi kependudukan	Urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	Dispendukcapil
				Rasio bayi berakte kelahiran	100%	100%	Penataan administrasi kependudukan	Urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	Dispendukcapil
				Rasio pasangan berakte nikah	98%	99%	Penataan administrasi kependudukan	Urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	Dispendukcapil
				Kepemilikan KTP	100%	100%	Penataan administrasi kependudukan	Urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	Dispendukcapil
				Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	64,95%	77,91%	Penataan administrasi kependudukan	Urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	Dispendukcapil
				Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	ada	ada	Penataan administrasi kependudukan	Urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil	Dispendukcapil
	4. Perlakuan aparatur yang mencerminkan nilai-nilai <i>good governance</i> (adil, transparan, penegakkan hukum, menghormati	1.1.4. Penegakan regulasi sesuai konsekuensi hukumnya didukung oleh penyediaan informasi publik secara transparan dengan menggunakan tehnologi informasi dan media informasi	1.1.4.1.Penegakan sistem reward anda punishment sesuai regulasi yang berlaku 1.1.4.2.Menyediakan sistem informasi publik yang aksesibel oleh publik 1.1.4.3.Membangun sistem	Tingkat pelanggaran etika aparat; yg mencakup: 1. Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin	12,66%	2%	Peningkatan Disiplin Pegawai	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ham) dalam memberikan pelayanan publik	lain yang kontekstual sehingga memudahkan pengawasan publik	pengaduan publik yang aksesibel oleh publik	2. Persentase Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun 3. Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	95 20 orang	96 15 orang			
				1. Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin	0,12	0,02		Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
				Persentase Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 Tahun	95%	96%		Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
				Penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	20 org	15 org		Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan	BKD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								Persandian	
	5. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	1.1.5.Mengefektifkan forum stakeholder secara berkala untuk meningkatkan ketepatan isu pembangunan	1.1.5.1.Setiap SKPD atau gabungan diwajibkan memiliki forum dialog dengan stakeholders untuk merumuskan isu-isu pembangunan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral maupun kewilayahan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Fisik Prasarana yang berkualitas (update dan valid)	7 dokumen	30 dokumen	Perencanaan Bidang Ekonomi Perencanaan Bidang Sosbud Perencanaan Bidang Tata Ruang	Urusan Wajib Perencanaan pembangunan	Bappeda Didukung semua SKPD
				Dokumen RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	ada	ada	Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Wajib Perencanaan pembangunan	Bappeda Didukung semua SKPD
				Dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	ada	ada	Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Wajib Perencanaan pembangunan	Bappeda Didukung semua SKPD
				Dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota	ada	ada	Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Wajib Perencanaan pembangunan	Bappeda Didukung semua SKPD
				Tingkat Konsistensi Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	90%	90%	Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Wajib Perencanaan pembangunan	Bappeda Didukung semua SKPD
	6. Diciptakannya	1.2.1.Penyediaan	1.2.1.1. Penyediaan dokumen	Jumlah peraturan	4	15	Penataan	Urusan wajib	Setda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	hubungan resiprositas (timbang balik) antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, masyarakat berbasis demokrasi dan transparansi informasi (penghormatan hak asasi, penegakkan hukum, dan pemenuhan kewajiban tanggungjawab pada publik)	informasi perencanaan, dan penganggaran secara transparan dan aksesibel sebagai informasi publik sehingga memfasilitasi efektivitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan sehingga meningkatkan akuntabilitas Dewan pada publik	informasi tepat waktu dan tepat kebutuhan pelayanan publik	yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah			peraturan perundang-undangan Pembahasan rancangan peraturan daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
	7. Meningkatnya penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi semua	1.2.2. Penegakan regulasi sesuai konsekuensi hukumnya didukung oleh penyediaan informasi publik publik secara transparan dengan menggunakan tehnologi informasi dan media informasi lain yang kontekstual sehingga memudahkan pengawasan publik	1.2.2.1.Penegakan sistem reward anda punishment sesuai regulasi yang berlaku	Tingkat penyelesaian permasalahan hukum	100 %	100 %	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setda
			1.2.1.2.Menyediakan sistem informasi publik yang aksesibel oleh publik sebagai sarana	Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam	4	20	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan	Setda Didukung Setwan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			mendapatkan input penyusunan regulasi untuk mendistribusikan nilai kepastian hukum dan keadilan bagi semua	penyusunan Perda				Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
			Membangun sistem pengaduan publik yang aksesibel oleh publik	Jumlah Perda yang mengakomodasi masukan masyarakat	7	35	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setda Didukung Setwan
	8. Meningkatnya ketaatan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Mengelola organisasi dan manajemen pemerintah daerah sesuai regulasi	Mengupayakan ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran	Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu	Tepat	Tepat	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD Didukung semua SKPD
			Menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Ditetapkannya dokumen perencanaan sesuai peraturan yang berlaku (RPJM, RKPD)	Sesuai	Sesuai	Perencanaan pembangunan daerah	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bappeda Didukung semua SKPD
			Penyusunan organisasi pemerintah daerah sesuai regulasi	Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-	Sesuai	Sesuai	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,	Setda Didukung semua SKPD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				undangan yang berlaku				Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
MISI 2: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat									
2	1. Meningkatkan keterpaduan sumber pendanaan baik dari pusat, provinsi dan daerah.	2.1.1.Penguatan regulasi daerah untuk peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan	2.1.1.1.Review regulasi daerah yang menghambat peningkatan kapasitas dan efisiensi keuangan daerah 2.1.1.2.Penegakan reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD Adanya reward dan punishment kepada SKPD dalam pengelolaan keuangan 	12 % Belum	18 % Sudah	Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setda
	2. Meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah	2.1.2.Penguatan regulasi daerah untuk pengelolaan aset daerah 2.1.2.Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi potensi dan aset daerah, efisiensi belanja, maupun kerjasama dengan pihak ketiga	2.1.2.1. Optimalisasi penggunaan aset daerah yang belum dikelola optimal 2.1.2.2.Pengendalian efisiensi belanja melalui perencanaan sesuai Standar Belanja Umum berdasar regulasi yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> Asset daerah yang dikelola pihak lain. Adanya kebijakan daerah mengenai efisiensi belanja 	12% ada	25% ada	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	setda
		2.1.2.Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui	2.1.2.3.Menyusun rencana aksi pengembangan investasi pemerintah dan	Adanya kebijakan pengembangan investasi dalam	belum	ada	Penataan Penguasaan, Penggunaan dan	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan	Setda didukung seluruh SKPD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		optimalisasi potensi dan aset daerah, efisiensi belanja, maupun kerjasama dengan pihak ketiga	swasta untuk pengelolaan potensi dan aset daerah dalam rangka peningkatan kapasitas keuangan daerah	pengelolaan potensi dan aset daerah			Pemanfaatan Tanah	Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
		2.1.2.Review dan penyusunan regulasi	2.1.2.4. Implementasi regulasi untuk penertiban aset daerah	Kebijakan penertiban aset daerah	sudah	sudah	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setda didukung seluruh SKPD
	3. Meningkatkan kemudahan akses pendanaan melalui lembaga-lembaga keuangan serta membangun kemitraan dalam memanfaatkan skema pendanaan al: kerjasama pemerintah dan swasta (KPS/ <i>Public Private Partnership</i> (PPP), <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan donasi/zakat	2.1.3.Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui kerjasama dengan pihak ketiga (lembaga keuangan dan dunia usaha)	2.1.3.1.penyediaan data daerah dan layanan perijinan yang pro investasi	Jumlah kerjasama dengan lembaga keuangan Jumlah kerjasama dengan swasta Jumlah dan jenis bank dan cabang perusahaan asuransi	0 Ada 49 Bank/BPR 11 asuransi	3 Ada 55 Bank/BPR 11 asuransi	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Setda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.	2.1.4..Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui ekstensifikasi & intensifikasi pajak	2.1.4.1.Meningkatkan tertib administrasi perpajakan	Jumlah dan macam pajak Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	7 2	7 2	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKD
	5. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam hal investasi.	2.1.5.Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui kerjasama antar daerah untuk meningkatkan ivestasi	2.1.5.1. Perluasan kerjasama daerah	Jumlah dan jenis kerjasama antar daerah yang berhasil dijalin	0	3	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	KPM
	6. Meningkatnya iklim investasi dan realisasi investasi	2.1.5.Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui kerjasama antar daerah untuk meningkatkan ivestasi	2.1.5.1.Review regulasi yang kontra produktif dan penyusunan regulasi yang pro investasi	Bertambahnya laju pertumbuhan investasi	143	358	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	KPM
				Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN	24.627.613.819	24.660.000.000	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Urusan Penanaman modal daerah	KPM Didukung seluruh SKPD
				Rasio daya serap tenaga kerja	6.088	36.533	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Urusan Penanaman modal daerah	KPM Didukung seluruh SKPD
				Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	43	47	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Urusan Penanaman modal daerah	KPM Didukung seluruh SKPD

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	24.627.613.819	93,584,932,514	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Urusan wajib Penanaman modal daerah	KPM Didukung seluruh SKPD
	7. Meningkatkan kemudahan pelayanan dalam mendorong peluang investasi di daerah	2.1.5.Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui kerjasama antar daerah untuk meningkatkan investasi	2.1.5.1.Review regulasi yang kontra produktif dan penyusunan regulasi yang pro investasi	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Urusan wajib Penanaman modal daerah	KPM
				Lama proses perijinan	5	2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Urusan wajib Penanaman modal daerah	BP2T
	8. Membangun kepercayaan/komitmen antara stakeholder dengan dunia usaha.	Pengembangan kapasitas keuangan daerah melalui kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat	Tranparansi informasi dan iklim yang kondusif untuk membangun kepercayaan calon investor	Jumlah investor dan nilai investasi baru yang masuk (nasional & regional)	0	3	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Urusan wajib Penanaman modal daerah	KPM
3	1. Terwujudnya pengembangan infrastruktur kawasan strategis dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kota	2.3.1.Pembangunan sarana prasarana kota berdasarkan kriteria prioritas, yaitu peningkatan kemampuan ekonomi tidak membahayakan keberlanjutan kelestarian sumber daya alam dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, termasuk	2.3.1.1.Penguatan kontrol dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana umum berdasar kriteria prioritas pembangunan dan aksesibel bagi semua kelompokmasyarakat, terutama kelompokk diffabel	Bertambahnya jumlah pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	1	3	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Urusan wajib Penanaman modal daerah	KPM Bappeda PU

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		diffabel							
	2. Terwujudnya kemitraan dengan memanfaatkan skema pendanaan melalui Kerjasama pemerintah dan swasta PES (<i>Payment for Ecological/environment services</i> : imbal jasa lingkungan)	2.2.2.Menciptakan kondisi penyediaan data daerah, termasuk kelompok usaha dan layanan perijinan yang pro investasi	2.3.1.1.Penyediaan akses informasi peluang modalyang aksesibel oleh semua kelompok masyarakat	Jumlah kerja sama PES (<i>Payment for Ecological/ environment Services</i> = imbal jasa lingkungan	0	1	Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Diskoperindag
	3. Terwujudnya identifikasi investasi swasta	Menciptakan kondisi penyediaan data daerah, termasuk kelompok usaha dan layanan perijinan yang pro investasi	Penyediaan akses informasi peluang modal yang aksesibel oleh semua kelompok masyarakat	Nilai investasi swasta	24.627.613.819	145.854.800.749	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Urusan wajib Penanaman modal daerah	KPM
	4. Menyediakan data dan informasi ketenagakerjaan yang aksesibel dan akurat	2.3.1.Penyediaan akses informasi ketenagakerjaan yang aksesibel oleh semua kelompok masyarakat pencari kerja	2.3.3.1.Update informasi peluang kerja dari dunia usaha dan menyebarluaskan dengan cepat dan aksesibel	Sebaran informasi bursa kerja yang terupdate	17 kel	17 kel	Penyebarluasan informasi bursa kerja	Urusan wajib tenaga kerja	Disnakertransos
	5. Terwujudnya pembangunan BLK di tingkat Kota	2.3.2.Fasilitasi pelatihan ketrampilan kerja	Memperluas kapasitas BLK	Jumlah BLK	0	1	Peningkatan kesempatan kerja	Urusan wajib tenaga kerja	Disnakertransos

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dengan mengikuti kebutuhan pasar potensial							
	6. Meningkatnya jumlah penempatan tenaga kerja	2.3.2.Fasilitasi pelatihan ketrampilan kerja dengan mengikuti kebutuhan pasar potensial	2.3.4.1.Mendorong pembukaan jenis ketrampilan life skill lebih beragam	Prosentase pencari kerja yang ditempatkan	28%	32%	Peningkatan kesempatan kerja	Urusan wajib tenaga kerja	Disnakertransos
	7. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	2.3.2.Fasilitasi pelatihan ketrampilan kerja dengan mengikuti kebutuhan pasar potensial	2.3.4.1.Mendorong pembukaan jenis ketrampilan life skill lebih beragam	Tingkat partisipasi angkatan kerja	62.5%	63,2%	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Urusan wajib tenaga kerja	Disnakertransos
				Tingkat pengangguran terbuka	14.95%	9%	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Urusan wajib tenaga kerja	Disnakertransos
				Calon tenaga kerja yang terdidik (pencari kerja terlatih)	8,9%	10,5%	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Urusan wajib tenaga kerja	Disnakertransos
	8. Meningkatnya perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	2.3.3. Penegakan tertib hukum pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	1. Mengefektifkan forum dialog pemerintah – pengusaha – serikat pekerja	Angka perselisihan pengusaha pekerja per tahun	20%	15%	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Urusan wajib tenaga kerja	Disnakertransos
	9. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan	2.3.3. Penegakan tertib hukum pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	1. Mengefektifkan forum dialog pemerintah – pengusaha – serikat pekerja	Jumlah LKS Bipartit	33	33	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Urusan wajib tenaga kerja	Disnakertransos
	10. Terwujudnya peran serta dan	Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan	2.3.4.1.Mendorong	Jumlah lembaga	13	15	Program	Urusan wajib tenaga	Disnakertransos

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	partisipasi lembaga-lembaga pendidikan dalam penyiapan kualitas tenaga kerja	masyarakat penyelenggara pendidikan ketrampilan/kecakapan hidup untuk menciptakan peluang usaha ekonomi mandiri	pembukaan jenis ketrampilan life skill lebih beragam	penyelenggara pelatihan kerja berperan aktif dalam peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja.			peningkatan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan	kerja	
	11. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pekerja	2.3.3. Penegakan tertib hukum pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	1. Mengefektifkan forum dialog pemerintah – pengusaha – serikat pekerja	Prosentase Pencapaian UMK terhadap KHL	90,12%	100%	Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi dalam ketenagakerjaan	Urusan wajib tenaga kerja	Disnakertransos
				Prosentase penurunan kasus-kasus ketenagakerjaan di Kota Magelang, baik kasus perselisihan hubungan industrial maupun kasus TKI	3%	2%	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Urusan wajib tenaga kerja	Disnakertransos
	12. Terciptanya wirausaha baru	Mengembangkan jejaring antara pemerintah, dunia usaha, dan calon wirausaha	Memberi Kemudahan informasi dan perijinan usaha pada usaha yang menghidupkan ekonomi rakyat	Jumlah wirausaha baru	20	25	Peningkatan kesempatan kerja	Urusan wajib tenaga kerja	Disnakertransos
	13. Terlindunginya hak-hak keselamatan tenaga kerja	2.3.3. Penegakan tertib hukum pengawasan dan perlindungan tenaga kerja	1. Mengefektifkan forum dialog pemerintah – pengusaha – serikat pekerja	Prosentase perusahaan yang telah menerapkan norma keselamatan	0,75%	3,73%	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Urusan wajib tenaga kerja	Disnakertransos

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				dan perlindungan ketenagakerjaan					
MISI 3: Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian masyarakat									
3	1. Bertambahnya pelaku usaha di sektor riil (berbagai bidang usaha).	3.1.1.Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran	3.3.1.1.Menambah stimulasi dan fasilitasi untuk peningkatan manajemen dan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) ;	Jumlah bidang usaha Sektor riil yang berkembang	1045	1500	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan SKPD Pendukung: Setda Bappeda,DPP, PM, BP2T,
	2. Meningkatnya akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kerakyatan	3.1.1.Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran	3.3.1.1.Menambah stimulasi dan fasilitasi untuk peningkatan manajemen dan permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) ;	Jumlah pelaku usaha ekonomi kerakyatan menerima akses permodalan	710 unit usaha	1500	Program pengembangan sistem pendukung bagi UMKM	Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan SKPD Pendukung: Setda Bappeda,DPP, PM, BP2T,
	3. Tersedianya kawasan PKL yang tertata sesuai rencana tata ruang	3.1.1.Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan	3.3.1.3.Mengembangkan sarana dan layanan perdagangan	Jumlah sektor informal / PKL yang tertata	100	310	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Urusan pilihan perdagangan	DPP didukung oleh Diskoperindag, Setda, DPU, Bappeda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	4. Meningkatnya kemampuan kelembagaan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan	3.1.1. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan	3.3.1.2. Penguatan manajemen pemasaran	Jumlah kelembagaan PKL yang tertib administrasi	4	26	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Urusan pilihan perdagangan	DPP didukung oleh Diskoperindag, Setda, DPU, Bappeda
	5. Tersedianya pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutunya, aman, merata, halal dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.	3.2.1. Penyediaan kebutuhan pangan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat,	3.4.1.1. analisis potensi unggulan daerah untuk dikembangkan menjadi agro bisnis, 3.4.1.2. Pengembangan model kerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk pengembangan industri kreatif berbasis pertanian dan potensi lokal	Adanya regulasi ketahanan pangan	ada	ada	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Urusan pilihan Pertanian	BPMPKB Didukung Dinas Pertanian, SETDA
				Ketersediaan pangan utama	sudah	sudah	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Urusan pilihan Pertanian	BPMPKB Didukung oleh Dinas Pertanian, SETDA
				Cakupan beras bersubsidi pada KK miskin	6.961 RTS-PM	4.598 RTS-PM.	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Urusan pilihan Pertanian	BPMPKB Didukung oleh Dinas Pertanian, SETDA
				Tingkat kerawanan pangan dan gizi	Tidak ada	Tidaka ada	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Urusan pilihan Pertanian	BPMPKB Didukung oleh

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							unan		Dinas Pertanian, SETDA
	6. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui gerakan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	3.2.1. Penyediaan kebutuhan pangan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat,	Gerakan diversifikasi pangan	Tingkat diversifikasi konsumsi Pangan yang beragam bergizi, seimbang dan aman	87,6	93,7%	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan	Urusan pilihan Pertanian	BPMPKB Didukung oleh Dinas Pertanian, Diskoperindag
				Tersedianya database produk pangan lokal	Tidak ada	ada	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan	Urusan pilihan Pertanian	BPMPKB Didukung Dinas Pertanian, Diskoperindag
	7. Meningkatnya produktifitas UMKM melalui pemanfaatan teknologi dan pemenuhan sarana prasarana usaha	1.3.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan teknologipemasaran untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).	3.5.1.2. Pengembangan model kerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk pengembangan industri kreatif dan potensi lokal	Jumlah UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi dan terpenuhi sarana prasarana	150	350	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
				Persentase UMKMK yang produktif	30%	100%	Program peningkatan kapasitas IPTEK	Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinkopperindag Didukung:

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							sistem produks		Setda, DPPKD, Bappeda
	8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi	pemberdayaan koperasi	3.5.1.2.Pengembangan model kerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk pengembangan koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	67%	75%	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
				Junlah koperasi	214	220	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
	9. Semakin meluasnya pangsa pasar UMKM	Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan dan Dinkopperindagkop 1.3.2. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).	3.5.1.2.Pengembangan model kerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk pengembangan pemasaran	Jumlah promosi UMKMK	2	16	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Urusan pilihan perdagangan	Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Jumlah kontak dagang dan temu usaha.	6	24	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Urusan pilihan perdagangan	Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
				Jumlah industri rumah tangga	1.770	2.150	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Urusan pilihan perdagangan	Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
				Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	3,33 %	5,5 %	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Urusan pilihan perdagangan	Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
	10. Berkembangnya jumlah UMKM dan daya saing usaha.	1.3.3. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).	3.5.1.1. Analisis potensi unggulan daerah untuk dikembangkan menjadi agro industri, 3.5.1.2. Pengembangan model kerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk pengembangan industri kreatif berbasis potensi lokal	Jumlah UMKMK, Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, Usaha mikro dan kecil	710	800	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD, Bappeda
	11. Bertambahnya volume fasilitasi kredit yang bisa diakses UMKM	1.3.4. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan	3.5.1.2. Pengembangan model kerjasama dengan swasta dan masyarakat untuk	Jumlah UMKMK yang memanfaatkan kredit	310	400	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinkopperindag Didukung: Setda, DPPKD,

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).	peluang penambahan modal	Jumlah BPR / LKM					Bappeda
	12. Terwujudnya SDM pertanian, peternakan dan perikanan yang berkualitas	3.4.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat	3.6.1.1. Penyadaran masyarakat kelurahan tentang pembudayaan pertanian, peternakan dan perikanan 3.6.1.2. Fasilitasi ketrampilan pembudayaan pertanian, peternakan dan perikanan	Rasio petani terlatih Pertanian Peternakan Perikanan	65% 50% 60%	80 % 75 % 80 %	Peningkatan kesejahteraan Petani	Urusan pilihan pertanian	Dinas Pertanian
	13. Meningkatnya jenis usaha agribisnis	3.4.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan agri bisnis	3.6.1.1. Penyadaran masyarakat kelurahan tentang pembudayaan tanaman agri bisnis 3.6.1.2. Fasilitasi ketrampilan pembudayaan tanaman agri bisnis	Jumlah jenis bidang usaha agribisnis	6	11	Peningkatan pemasaran hasil produksi	Urusan pilihan pertanian	Dinas Pertanian
	14. Terfasilitasinya pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran	3.4.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang	3.6.1.1. Penyadaran masyarakat kelurahan tentang pembudayaan tanaman agri bisnis	Jumlah tempat pengolahan pasca panen: Pertanian	1	5	Peningkatan pemasaran hasil	Urusan pilihan pertanian	Dinas pertanian

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan agri bisnis	3.6.1.2. Fasilitasi ketrampilan pembudayaan tanaman agri bisnis	Peternakan Perikanan	1 3	3 3			
	15. Termanfaatkannya tanah bengkok untuk pengembangan agribisnis.	3.4.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan agri bisnis	3.6.1.1. Penyadaran masyarakat kelurahan tentang pembudayaan tanaman agri bisnis 3.6.1.2. Fasilitasi ketrampilan pembudayaan tanaman agri bisnis	Prosentase konservasi sumberdaya lahan dan sumber daya hayati	3%	10%	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Urusan pilihan pertanian	Dinas Pertanian
	16. Tersusunnya strategi optimalisasi pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis tanaman pangan	3.4.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan agri bisnis	3.6.1.1. Penyadaran masyarakat kelurahan tentang pembudayaan tanaman agri bisnis 3.6.1.2. Fasilitasi ketrampilan pembudayaan tanaman agri bisnis	Prosentase pemanfaatan lahan	100%	100%	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Urusan pilihan pertanian	Dinas Pertanian
	17. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan)	3.5.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk	3.7.1.1. Meningkatkan frekuensi pertemuan kelompok tani dan peningkatan kualitas muatan pelatihan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	2,91%	2,91%	Program Peningkatan produksi pertanian	Urusan pilihan pertanian	Dinas pertanian

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pengembangan pertanian, peternakan, perikanan,							
	18. Meningkatnya produk hasil ternak baik secara kuantitas dan kualitas.	3.5.1. Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan pertanian, peternakan, perikanan,	3.7.1.1.Meningkatkan frekuensi pertemuan kelompok tani dan peningkatan kualitas muatan pelatihan	Jumlah produksi peternakan: daging telor susu Produksi perikanan kelompok petani	 3699000 Kg 350170 Kg 411752 lt 88 ton/tahun	 4004635 Kg 379042 Kg 445672 lt 335 ton/tahun	Program Peningkatanproduk si pertanian	Urusan pilihan pertanian	Dinas pertanian
	19. Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet	3.5.1.Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang permodalan, manajemen organisasi, dan pemasaran untuk pengembangan pertanian, peternakan, perikanan	3.7.1.1.Meningkatkan frekuensi pertemuan kelompok tani dan peningkatan kualitas muatan pelatihan	Jumlah ternak yg diperiksa kesehatannya	5.289	7.582	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Urusan pilihan pertanian	Dinas Pertanian
	20. Teridentifikasi kondisi social ekonomi petani Kota Magelang	3.7.1.Mengoptimalkan pembinaan kelompok petani untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian	Pendataan kondisi sosial ekonomi petani	Penguatan kelembagaan petani: Pertanian Peternakan Perikanan	 16klp 2 klp 17 klp	 16 klp 10 klp 17 klp	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Urusan pilihan pertanian	Dinas Pertanian
	21. Terwujudnya intensifikasi pertanian dengan menggunakan	Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan	Meningkatkan pemahaman kelompok tani tentang aplikasi tehnologi tepat guna dan penemuan baru untuk	Jumlah penggunaan benih padi bermutu	3000	6000	Program Intensifikasi padi & palawija	Urusan pilihan pertanian	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	varietas unggul baru	masyarakat di bidang teknologi untuk pengembangan pertanian,	meningkatkan kualitas hasil pertanian						
	22. Menurunnya serangan OPT	Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang teknologi untuk pengembangan pertanian,	Meningkatkan pemahaman kelompok tani tentang aplikasi tehnologi tepat guna dan penemuan baru untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian	Jumlah serangan OPT yang dapat diatasi	100%	100%	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan	Urusan pilihan pertanian	Dinas Pertanian
	23. Tersedianya benih/bibit berkualitas.	Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang teknologi untuk pengembangan pertanian,	Meningkatkan pemahaman kelompok tani tentang aplikasi tehnologi tepat guna dan penemuan baru untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian	Jumlah populasi unggas Domba / kambing sapi	60637 479 176	76401 603 222	Program peningkatan produksi peternakan	Urusan pilihan pertanian	Dinas Pertanian
	24. Terwujudnya peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi komoditas pangan	Pengembangan kerjasama antar pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di bidang teknologi untuk pengembangan pertanian,	Meningkatkan pemahaman kelompok tani tentang aplikasi tehnologi tepat guna dan penemuan baru untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian	jumlah penggunaan teknologi tepat guna (Panca usaha tani)	3 paket	5 paket	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan	Urusan pilihan pertanian	Dinas Pertanian
	25. Meningkatnya perlindungan hutan	3.8.1. Menegakkan regulasi (hukum) atas pengelolaan hutan ilegal dan memasyarakatkan penanaman hutan kembali	4.1.2.1.Penguatan kontrol dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana umum berdasar kriteria prioritas pembangunan dan aksesibel bagi semua kelompokmasyarakat,	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	20 ha	25 ha	Program nasional rehabilitasi hutan dan lahan	Urusan pilihan kehutanan	Dinas Pertanian

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			terutama kelompok diffabel						
				Konservasi kawasan hutan sebesar	71 ha	71 ha	Program nasional rehabilitasi hutan dan lahan	Urusan pilihan Kehutanan	Dinas Pertanian
MISI 4: Meningkatkan Pembangunan pelayanan perkotaan dengan pengembangan budaya daerah disertai dengan peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan aspek kemandirian									
4	1. Tersedianya kelengkapan Rencana Tata Ruang dari RTRW, RDTRK, RTH dan RTBL	4.1.1. Penyusunan dokumen dan Penegakan hukum implementasi RTRW	4.1.1.1. Penggunaan dokumen tata ruang sebagai dasar pembangunan kewilayahan 4.1.1.2. Penegakan sanksi pelanggaran RTRW	Tersedianya dokumen RTRW dan Perda RTRW 2010 -2030, RDTRK dan Perda RDTRK 2010 - 2020, RTH, dan RTBL Kawasan Strategis Lingkungan Hidup (Gunung Tidar)	0%	70%	Program Perencanaan Tata Ruang	Urusan wajib Penataan Ruang	DPU
				Tersedianya sarana informasi Rencana tata Ruang Wilayah Kota Magelang kepada masyarakat	30%	100%	Program Perencanaan Tata Ruang	Urusan wajib Penataan Ruang	Bappeda
				Jumlah Ijin Lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang	100%	100%	Program Pemanfaatan Ruang	Urusan wajib Penataan Ruang	DKPT
	2. Peningkatan kualitas Prasarana/ infrastruktur Perkotaan	Pembangunan sarana prasarana kota (infrastruktur perumahan,	4.1.2.1. Penguatan kontrol dan pengendalian pembangunan sarana	Proporsi Panjang Jalan Kota Magelang dengan	65%	90%	Program Pembangunan Jalan dan	Urusan wajib Pekerjaan Umum	DPU

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		transportasi, informasi) berdasarkan kriteria prioritas, yaitu peningkatan kemampuan ekonomi tidak membahayakan keberlanjutan kelestarian sumber daya alam dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, termasuk difabel	dan prasarana umum berdasar kriteria prioritas pembangunan dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, terutama kelompok difabel	kondisi baik			Jembatan		
				Rasio Pasar Tradisional dalam kondisi baik	90%	90%	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Urusan wajib Perencanaan Pembangunan	DPP
				Prosentase penanganan sampah di TPSA (pengolahan sanitary landfill)	70%	80%	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Urusan wajib Perencanaan Pembangunan	DKPT
	3. Pengembangan Infrastruktur perumahan	Pembangunan sarana prasarana infrastruktur perumahan, berdasarkan regulasi	4.1.2.1.Penguatan kontrol dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana perumahan berdasar kriteria prioritas pembangunan dan aksesibel bagi semua	Rasio jumlah rumah layak huni	98,12%	98,17%	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Urusan wajib Perencanaan Pembangunan	DPU

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			kelompok masyarakat, terutama kelompok difabel						
				Tersedianya Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Bidang Permukiman (non-fisik)	Belum ada	ada	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Urusan wajib Perencanaan Pembangunan	DPU
				Rasio luas lingkungan permukiman kumuh	49%	44%	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Urusan wajib perumahan	DPU
	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	4.1.2. Pembangunan sarana prasarana kota tidak membahayakan keberlanjutan kelestarian sumber daya alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan RTH sesuai regulasi 2. Pengendalian tata guna lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup 	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	13%	20%	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Urusan wajib Lingkungan Hidup	DKPT
				Pengembangan RTH Publik Pusat Kota (Kaw alon-alon)	50%	100%	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Urusan wajib Lingkungan Hidup	DKPT
				Sempadan sungai yang dipakai	20%	15%	Program pengembangan,	Urusan wajib Pekerjaan Umum	DKPT

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				bangunan liar			pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya		
				Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	30%	75%	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Urusan wajib Lingkungan Hidup	KLH
				Jumlah industri berpotensi mencemari udara	Tidak ada	Tidak ada	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Urusan wajib Lingkungan Hidup	KLH
				Tersedianya Dokumen SLHD	ada	ada	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Urusan wajib Lingkungan Hidup	KLH
				Penegakan hukum lingkungan hidup	100%	100%	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Urusan wajib Lingkungan Hidup	
	5. Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis	4.1.2. Pembangunan sarana prasarana kota (infrastruktur perumahan, transportasi, informasi) berdasarkan kriteria prioritas, yaitu	Penguatan kontrol dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana umum berdasar kriteria prioritas pembangunan dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, terutama kelompok diffabel	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh sebanyak 4 Kawasan yaitu	25%	75%	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Wajib umum Pekerjaan	DPU

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		peningkatan kemampuan ekonomi tidak membahayakan keberlanjutan kelestarian sumber daya alam dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, termasuk diffabel		GOR Samapta, Sidotopo, Sentra Ekonomi Lembah Tidar, dan Alun-alun					
	6. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Transportasi Angkutan Darat	4.1.3. Pembangunan infrastruktur transportasi berdasarkan kriteria prioritas, yaitu peningkatan kemampuan ekonomi dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, termasuk diffabel	Penguatan kontrol dan pengendalian pembangunan infrastruktur transportasi berdasar kriteria prioritas pembangunan dan aksesibel bagi semua kelompok masyarakat, terutama kelompok diffabel	Jumlah sarana prasarana lalu lintas jalan raya (APPIL)	75%	85%	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Wajib Perhubungan	Dishubkominfo
				Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Terminal tipe A dg kondisi yg baik di Kota Magelang	50%	80%	Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	Wajib Perhubungan	Dishubkominfo
				Prasarana angkutan darat berupa terminal	50%	75%	Program Pembangunan sarana dan	Urusan wajib Perhubungan	Dishubkominfo

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				angkutan barang dengan kondisi baik			Prasarana Perhubungan		
				Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type c) yang tertata	50%	70%	Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	Wajib Perhubungan	Dishubkominfo
				Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik	70%	90%	Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan		Dishubkominfo
				Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum	60%	90%	Program pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	Wajib Perhubungan	Dishubkominfo
				Jumlah uji KIR angkutan umum dan angkutan barang di Kota Magelang	2218KBWU	2218KBWU	Peningkatan kelaikan pengoperasional kendaraan bermotor	Wajib Perhubungan	Dishubkominfo
				Rasio kepemilikan KIR angkutan umum	10%	5%	Program Peningkatan kelaikan pengoperasional kendaraan bermotor	Wajib Perhubungan	Dishubkominfo
				Lama pengujian kelayakan angkutan umum	30 menit	30 mnt	Program Peningkatan kelaikan	Wajib Perhubungan	Dishubkominfo

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				(KIR)			pengoperasional kendaraan bermotor		
				Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	36.000	36.000	Program Peningkatan kelaikan pengoperasional kendaraan bermotor	Wajib Perhubungan	Dishubkominfo
				Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte/Sub terminal yang ada di Kota Magelang)	18	15	Program Pembangunan sarana dan prsarana perhubungan	Wajib Perhubungan	Dishubkominfo
				Rasio ijin trayek	0,82	0,77	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Wajib Perhubungan	Dishubkominfo
				Jumlah arus penumpang angkutan umum	179.976	179.976	Program peningkatan pelayanan angkutan	Wajib Perhubungan	Dishubkominfo
				Jumlah orang/barang yang melalui terminal per tahun	179.976	179.976	Program Peningkatan pelayanan angkutan	Wajib Perhubungan	Dishubkominfo
	7. Terwujudnya prasarana komunikasi dan informasi masyarakat yang	4.1.4. Pembangunan sarana prasarana komunikasi dan informasi aksesibel bagi semua kelompok	Penguatan kontrol dan pengendalian pembangunan sarana prasarana komunikasi dan	Jumlah jaringan komunikasi operator dengan kondisi baik	12	15	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan	Urusan Komunikasi dan Informatika	Wajib dan Dishubkominfo

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	berkelanjutan	masyarakat,	informasi aksesibel bagi semua kelompok masyarakat,				media massa			
				Jumlah sarana penyedia informasi melalui media informasi	11	13	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Urusan Komunikasi dan Informatika	Wajib dan	Dishubkominfo
				Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	7	17	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Urusan Komunikasi dan Informatika	Wajib dan	Dishubkominfo
				Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,098%	0,059%	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Urusan Komunikasi dan Informatika	Wajib dan	Dishubkominfo
				Tersedianya / Jumlah Hot Spot pada ruang terbuka publik di Kota Magelang	1 titik	5 titik	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Urusan Komunikasi dan Informatika	Wajib dan	Dishubkominfo
	8. Tercapainya peningkatan daya saing dan daya jual destinasi pariwisata guna meningkatkan pelayanan yang lebih baik	Memfasilitasi kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat untuk menggali dan memelihara kelompok seni budaya dan pariwisata	Analisis stakeholder organisasi/ kelompok masyarakat untuk mengembangkan Gerakan sadar wisata	Jumlah Kunjungan wisata	984060	1119365	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Urusan pariwisata	pilihan	Disbudparpora

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kepada wisatawan								
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	7,8	8,0	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Disporabudpar
	9. Terdatanya lembaga/ kelompok seni dan budaya.	4.2.1.Memfasilitasi kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat untuk menggali dan memelihara kelompok seni budaya dan pariwisata 4.2.2.Menggiatkan aktualisasi seni budaya lokal dan memperluas jangkauan promosi untuk pencitraan daerah	4.2.1.1.Analisis stakeholder organisasi/ kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni budaya 4.2.1.2.pengembangan model pemberdayaan organiasi/kelompok masyarakat senibudaya untuk bersinergi dalam forum pengembangan seni budaya daerah	Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang	160	165	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Urusan wajib kebudayaan	Disporabudpar
	10. Meningkatnya pembinaan lembaga/ kelompok seni dan budaya.	4.2.1.Memfasilitasi kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat untuk menggali dan memelihara kelompok seni budaya dan	Penggalian dan publikasi kelompok seni budaya Menyusun kalender even pementasan ajang kreasi seni budaya daerah dan promosi warisan purbakala	Jumlah festival seni dan budaya.	3	5	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Urusan wajib kebudayaan	Disporabudpar

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pariwisata 4.4.4. Menggiatkan aktualisasi seni budaya lokal dan memperluas jangkauan promosi untuk pencitraan daerah	untuk pengembangan pariwisata dan pencitraan daerah						
				Jumlah gedung kesenian	1	2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Urusan kebudayaan wajib	Disporabudpar
	11. Terpeliharanya Museum dan peninggalan purbakala, serta cagar budaya.	4.2.1. Memfasilitasi kolaborasi dan sinergi dengan masyarakat untuk menggali dan memelihara kelompok seni budaya dan pariwisata 4.2.2. Menggiatkan aktualisasi seni budaya lokal dan memperluas jangkauan promosi untuk pencitraan daerah	Pemeliharaan dan Pemasyarakatan peninggalan purbakala, serta cagar budaya. Aktualisasi seni budaya	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	36	36	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Urusan kebudayaan wajib	Disporabudpar
	12. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	.Memfasilitasi masyarakat memahami persoalannya sendiri dan membangun jaringan untuk mengatasi masalahnya, di	4.3.1.1. Analisis stakeholder organisasi/ kelompok masyarakat berdasar profesi atau kewilayahan	rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	29%	70%	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib	BPMPKB

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		bidang ekonomi, inovasi teknologi, kesehatan, pembangunan fisik, pemberdayaan perempuan	4.3.1.3. pengembangan model pemberdayaan perempuan untuk partisipasi dalam pembangunan 4.3.1.4. Peningkatan kualitas perempuan dan anak.						
				LPM berprestasi	5,88	17,65	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (kota)	Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPKB
				Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	80%	95%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (kota)	Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPKB
				pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100%	100%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (kota)	Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPKB
	13. Meningkatnya pengembangan kreativitas dan inovasi teknologi terapan masyarakat	Memfasilitasi masyarakat memahami persoalannya sendiri dan membangun jaringan untuk mengatasi masalahnya, di bidang ekonomi, inovasi teknologi,	Pemasyarakatan kreasi, inovasi, dan tehnologi tepat guna	Kelurahan yang menerapkan TTG (Teknologi Tepat Guna)	18	100	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;	Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPKB

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kesehatan, pembangunan fisik, pemberdayaan perempuan							
				Jumlah Krenova yang terdata	11	15	Perencanaan Sosial budaya	Urusan wajib perencanaan pembangunan	KANTOR LITBANG DAN STATISTIK
	14. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat	Memfasilitasi masyarakat memahami persoalannya sendiri dan membangun jaringan untuk mengatasi masalahnya, di bidang ekonomi, inovasi teknologi, kesehatan, pembangunan fisik, pemberdayaan perempuan	4.3.1.3. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat partisipasi dalam pembangunan	Jumlah LKK dan lembaga keuangan masyarakat yang sehat dan berkualitas	35%	70%	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Urusan wajib perencanaan pembangunan	BPMPKB didukung oleh: SETDA, DISKOPERINDA G, KECAMATAN, KELURAHAN
	15. Terlaksananya review pokjnal orientasi kader dan pemilihan posyandu berprestasi	Memfasilitasi masyarakat memahami persoalannya sendiri dan membangun jaringan untuk mengatasi masalahnya, di bidang ekonomi, inovasi teknologi, kesehatan, pembangunan fisik, pemberdayaan perempuan	Pengembangan model pemberdayaan masyarakat partisipasi dalam pembangunan	Posyandu aktif	100%	100 %	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Urusan wajib keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPMPKB Didukung: KECAMATAN & KELURAHAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Jumlah posyandu yang berprestasi	0,52%	2,58%	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPMKB Didukung:KECA MATAN & KELURAHAN
	16. Meningkatkan koordinasi dan kinerja TKPK secara sinergis	Memfasilitasi masyarakat memahami persoalannya sendiri dan membangun jaringan untuk mengatasi masalahnya, di bidang ekonomi, inovasi teknologi, kesehatan, pembangunan fisik, pemberdayaan perempuan	Pengembangan model pemberdayaan masyarakat partisipasi dalam pembangunan	Jumlah rakor dan monev TKPK	4 kali	6 kali	Perencanaan Sosial Budaya	Urusan wajib perencanaan pembangunan	Bappeda
	17. Meningkatkan kualitas program PNPM	Memfasilitasi masyarakat memahami persoalannya sendiri dan membangun jaringan untuk mengatasi masalahnya, di bidang ekonomi, inovasi teknologi, kesehatan, pembangunan fisik, pemberdayaan perempuan	Pengembangan model pemberdayaan masyarakat partisipasi dalam pembangunan	Jumlah LKM yang dapat dapat melaksanakan program dengan baik	10%	100%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Urusan Wajib sosial	BPMPKB
	18. Terlaksananya	Memfasilitasi	Pengembangan model	Jumlah anak	550	450	Program Upaya	Urusan Wajib sosial	BPMPKB DINAS

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PMTAS	masyarakat memahami persoalannya sendiri dan membangun jaringan untuk mengatasi masalahnya, di bidang ekonomi, inovasi teknologi, kesehatan, pembangunan fisik, pemberdayaan perempuan	pemberdayaan masyarakat partisipasi dalam pembangunan	sekolah yang mendapatkan PMTAS			Kesehatan Masyarakat		Didukung oleh: PENDIDIKAN
	19. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	4.3.1. Memfasilitasi masyarakat memahami persoalannya sendiri dan membangun jaringan untuk mengatasi masalahnya, di bidang ekonomi, inovasi teknologi, kesehatan, pembangunan fisik, pemberdayaan perempuan	4.3.1.3. Pengembangan model pemberdayaan perempuan untuk partisipasi dalam pembangunan 4.3.1.4. Peningkatan kualitas perempuan dan anak.	Rasio KDRT	0,10%	0,5%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Urusan Wajib pemberdayaan perempuan	BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	42,27%	42,35%	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Urusan Wajib pemberdayaan perempuan	BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	30%	31%	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Urusan Wajib pemberdayaan perempuan	BPMPKB Didukung: SETDA,

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							dalam pembangunan		KECAMATAN, KELURAHAN
				rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	23,53%	47,06	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Urusan Wajib pemberdayaan perempuan	BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
				Persentase tenaga kerja di bawah umur		0 %	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Urusan Wajib pemberdayaan perempuan	BPMKB
				Partisipasi angkatan kerja perempuan	68	77	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Urusan Wajib pemberdayaan perempuan	BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
				Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	68%	77%	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Urusan Wajib pemberdayaan perempuan	BPMPKB Didukung: SETDA, KECAMATAN, KELURAHAN
				PKK Aktif	100%	100%	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Urusan Wajib pemberdayaan perempuan	BPMPKB
MISI 5: Mendorong Peningkatan derajat kesehatan, pengembangan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif dan									

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
memiliki etos kerja yang tinggi									
5	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan	Menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas layanan kesehatan, terutama bagikelompok miskin	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.	78,23%	90%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Urusan wajib kesehatan	DKK
				Rasio dokter persatuan penduduk	0,796	0,995	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Urusan wajib kesehatan	DKK
				Rasio tenaga medis persatuan penduduk	1615	1936	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Urusan wajib kesehatan	DKK
	2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas layanan kesehatan, terutama bagikelompok miskin .	Cakupan rawat jalan terhadap jumlah penduduk	28%	15%	Program Pelayanan Pengobatan/Pera watan	Urusan Wajib kesehatan	DKK
				Cakupan rawat inap terhadap jumlah penduduk	25%	1,50%	Program Pelayanan Pengobatan/Pera watan	Urusan Wajib kesehatan	DKK
				Cakupan Puskesmas	100%	100%	Program Pelayanan Pengobatan/Pera watan	Urusan Wajib kesehatan	DKK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Cakupan Pembantu Puskesmas (PUSTU)	53%	80%	Program Pelayanan Pengobatan/Pera watan	Urusan Wajib kesehatan	DKK
				Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,16	0,15	Program Pelayanan Pengobatan/Pera watan	Urusan Wajib kesehatan	DKK
				rasio Rumah sakit persatuan penduduk	0,10	0,9	Program Pelayanan Pengobatan/Pera watan	Urusan Wajib kesehatan	DKK
				Terwujudnya RSU Tidar terakreditasi 16 pelayanan yang menjadi rujukan bagi daerah sekitar	75%	100%	Program Pelayanan Pengobatan/Pera watan	Urusan Wajib kesehatan	DKK
	3. Meningkatnya upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas layanan kesehatan, terutama bagikelompok miskin .	Angka kelangsungan hidup bayi	995,19/ 1000 KH	995,19/ 1000 KH	Program Keluarga Berencana (kegiatan: Promosi Pelayanan Khiba (Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi, dan Anak))	Urusan Wajib keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	DKK
				Angka usia harapan hidup	70,17	70,93	Program peningkatan kesehatan lansia	Urusan Wajib kesehatan	DKK
							Program perbaikan gizi masyarakat	Urusan Wajib kesehatan	DKK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	Program pencegahan, penanggulangan penyakit menular	Urusan Wajib kesehatan	DKK
				Angka kematian bayi	4,86/ 1.000KH	1,86/ 1.000 KH	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Urusan Wajib KB	DKK
5	4. Meningkatnya gizi masyarakat	5.1.1. Menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas layanan kesehatan, terutama bagikelompok miskin	Persentase balita gizi buruk	1,30	1	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Urusan Wajib kesehatan	DKK
	5. Berkurangnya kasus penyakit menular	5.1.1. Menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas layanan kesehatan, terutama bagikelompok miskin	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA.	85%	100%	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Urusan Wajib kesehatan	DKK
				Cakupan penemuan dan	100%	100%	Program pencegahan dan	Urusan Wajib kesehatan	DKK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				penanganan penderita penyakit DBD			penanggulangan penyakit menular		
	6. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas layanan kesehatan, terutama bagikelompok miskin	Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	97,47%	100%	Program Obat dan pembekalan kesehatan	Urusan Wajib kesehatan	DKK
	7. Meningkatnya jaminan keamanan obat dan makanan bagi kesehatan masyarakat	Menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas layanan kesehatan, terutama bagikelompok miskin	Prosentase jumlah obat dan makanan yang mendapatkan uji kewanamanan sehingga aman dikonsumsi masyarakat	80%	80%	Program Pengawasan obat dan makanan	Urusan Wajib kesehatan	RSU
				Prosentase penurunan angka korban keracunan obat dan makanan.	0	0	Program Pengawasan obat dan makanan	Urusan Wajib kesehatan	RSU
	8. Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	Menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Cakupan dan Kualitas layanan kesehatan, terutama bagikelompok miskin	Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan Keluarga Miskin dan Masyarakat Rentan	100	100	Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Urusan Wajib kesehatan	DKK
				Cakupan pelayanan	21,27%	100%	Program Pelayanan	Urusan Wajib kesehatan	DKK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.			kesehatan penduduk miskin		
	9. Meningkatnya kemandirian masarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	Mengembangkan model partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menangani kebutuhan kesehatan dasar masyarakat	Mengasah kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk kesehatan	Cakupan Rumah tangga sehat	97,4%	98%	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Urusan Wajib kesehatan	DKK
				Cakupan Kelurahan Siaga Aktif, Strata 3	17%	100%	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Urusan Wajib kesehatan	DKK
	10. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat	Mengembangkan model partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menangani kebutuhan kesehatan dasar masyarakat	Mengasah kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk kesehatan	Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar	97,5%	97,5%	Program engembangan Lingkungan Sehat	Urusan Wajib Perumahan	DKK
				Pengawasan lingkungan: Industri Rumah Tangga	50%	55%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Urusan Wajib Perumahan	DKK
				Rasio Pengembangan wilayah sehat (Permukiman, Obyek Wisata, Industri Rumah Tangga)	80%	80,35%	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Urusan Wajib Perumahan	DKK

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	11. Terkendalinya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera	Mendesain model penanganan masalah kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi dengan kelompok/organisasi masyarakat	Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat untuk berpartisipasi mengembangkan ekonomi kreatif; penanganan layanan sosial dasar), dan pembangunan fisik	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0,6	0,5	Program Keluarga Berencana	Urusan Wajib KB	BPMPKB
				Rasio akseptor KB	60%	100%	Program Keluarga Berencana	Urusan Wajib KB	BPMPKB
				Cakupan peserta KB aktif	75%	90%	Program Keluarga Berencana	Urusan Wajib KB	BPMPKB
				Peserta KB Keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I	65%	100%	Program Keluarga Berencana	Urusan Wajib KB	BPMPKB
	12. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Mendesain model penanganan masalah kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi dengan kelompok/organisasi masyarakat	Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat untuk berpartisipasi mengembangkan ekonomi kreatif; penanganan layanan sosial dasar), dan pembangunan fisik	Jumlah sarana sosial (panti jompo, panti asuhan, panti rehabilitasi)	8	9	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Urusan Wajib sosial	Disnakertransos
	13. Meningkatnya pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Mendesain model penanganan masalah kesejahteraan sosial berbasis kolaborasi dengan	Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat untuk berpartisipasi	Prosentase penanganan terhadap penyandang masalah	5,05%	12,92	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Urusan Wajib sosial	Disnakertransos

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kelompok/organisasi masyarakat	mengembangkan ekonomi kreatif; penanganan layanan sosial dasar), dan pembangunan fisik	kesejahteraan sosial					
				PMKS yang memperoleh bantuan sosial	5,05%	12,92	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Urusan Wajib sosial	Disnakertransos
	14.Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD).	5.1.3. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat.	5.1.3.1.Menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini 5.1.3.2.Memfasilitasi anak dari keluarga miskin mendapatkan PAUD 5.1.3.3.Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan pendidikan	APK PAUD	81,54%	90%	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Urusan Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	15.Meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar	5.1.3. Penyediaan layanan pendidikan dasar 9 tahun yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat.	5.1.3.1.Menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan dasar 9 tahun 5.1.3.2.Memfasilitasi kemampuan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	116,82%	116,95%	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Urusan Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			melanjutkan sekolah bagi keluarga miskin 5.1.3.4.Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan pendidikan						
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	142,26%	142,40%	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	133,84%	133,95%	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	182,49%	182,63%	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka rata-rata lama sekolah SD/MI	6	6	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs	3	3	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI	1,90	1,90	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs	2,37	2,37	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	1:88	1:70	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Rasio guru / murid	1:14	1:32	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Rasio guru / murid per kelas rata-rata	1:16	1:32	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	133,7%	135%	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	16. Meningkatkan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing jenjang pendidikan menengah	5.1.3. Penyediaan layanan pendidikan menengah yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat.	5.1.3.1. Menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan menengah umum, kejuruan, maupun non formal 5.1.3.2. Memfasilitasi kemampuan melanjutkan sekolah bagi keluarga miskin 5.1.3.3. Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket B	108,73%	108,85%	Program Pendidikan Menengah	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket B	80,58	80,70	Program Pendidikan Menengah	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka rata-rata lama sekolah SMA/SMK/MA	3	3	Program Pendidikan Menengah	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka pendidikan yang ditamatkan	3,96	3,96	Program Pendidikan Menengah	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA	142,16%	142,81%	Program Pendidikan Menengah	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	100%	100%	Program Pendidikan Menengah	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Rasio guru terhadap murid	1:10	1:10	Program Pendidikan Menengah	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1;10:31	1;10:31	Program Pendidikan Menengah	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	88164	87164	Program Pendidikan Menengah	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Melanjutkan (AM)	57,9%	85%	Program Pendidikan	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				dari SMP/MTs ke SMK/SMA/MA			Menengah		
	17. Meningkatkan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal	Penyediaan layanan pendidikan non formal, informal, yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan informal maupun non formal Memfasilitasi mendapatkan pendidikan informal maupun non formak bagi keluarga miskin Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan pendidikan Meningkatkan perluasan memperoleh pendidikan dan ketrampilan; 	Angka melek huruf	95%	97%	Pendidikan non formal	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka rata-rata lama sekolah	10,2	12	Pendidikan non formal	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka lulus pendidikan kesetaraan PaketA	93 %	100 %	Pendidikan non formal	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Angka lulus pendidikan kesetaraan	90%	97%	Pendidikan non formal	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Paket B					
				Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C	88%	90%	Pendidikan formal non	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				v. usia dewasa yang belum bersekolah terlayani pendidikan kesetaraan	48%	60%	Pendidikan formal non	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				i. persentase pengangguran usia 15-44 th memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup	4%	9%	Pendidikan formal non	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				persentase lembaga PNF terakreditasi c.	2%	3%	Pendidikan formal non	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah model layanan PNF Unggulan	9%	50%	Pendidikan formal non	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	18. Meningkatkan pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Khusus	Penyediaan layanan pendidikan khusus yang terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> Menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan khusus Memfasilitasi kemampuan melanjutkan sekolah bagi keluarga miskin 	Pendidikan khusus terakreditasi	30%	50%	Pendidikan luar biasa	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			3. Menyediakan sistem informasi publik dan sistem pengaduan publik atas penyelenggaraan pelayanan pendidikan						
	19. Meningkatkan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan untuk memenuhi layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat.	Menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal kualifikasi pendidik	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	72%	100%	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	20. Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada penyelenggaraan pendidikan	memenuhi layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat.	5.1.3.1. Menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan	Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO	1	5	Manajemen pelayanan pendidikan	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	21. Meningkatkan minat baca masyarakat	Memenuhi layanan pendukung pendidikan yang terjangkau dan berkualitas sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat.	Menetapkan target pencapaian standar pelayanan minimal perpustakaan yang aksesibel bagi semua kelompok masyarakat	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	32.156	39.500	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Wajib pendidikan	KANTOR PERPUSTAKAAN
				Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	49.804	58.834	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Wajib pendidikan	KANTOR PERPUSTAKAAN
	22. Meningkatkan wawasan	Penyediaan layanan pendidikan yang adil,	Pengarusutamaan keadilan gender dan wawasan	Prosentase sekolah	100%	100%	Program Manajemen	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kebangsaan, kearifan lokal dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pendidikan	terjangkau dan sesuai kebutuhan bagi semua kelompok masyarakat, dan berwawasan kebangsaan	kebangsaan serta kearifan lokal dalam kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan	melaksanakan kurikulum Bahasa Jawa			Pelayanan Pendidikan		
				Gap laki-laki dan perempuan dalam partisipasi pendidikan	0,8%	0,5%	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil kebijakan pendidikan	64,88%	64,88%	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Wajib Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
	23. Meningkatnya kualitas dan partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah	Membangun kolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk mengelola potensi pemuda dan olah raga	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat olahraga untuk bersinergi dalam forum pengembangan olahraga daerah Menyusun kalender even ajang laga olahraga daerah untuk pengembangan pariwisata dan pencitraan daerah 	Jumlah kegiatan kepemudaan	16	20	Program pengembangan dan Keserasian kebijakan Pemuda	Urusan wajib Pemuda dan Olah Raga	DISPORABUDPAR
				Jumlah organisasi pemuda	28	30	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Urusan wajib Pemuda dan Olah Raga	DISPORABUDPAR

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	24. Terwujudnya pembibitan, pembinaan, pemanduan olah raga secara kontinyu	Membangun kolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk mengelola potensi pemuda dan olah raga	1. Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat olahraga untuk bersinergi dalam forum pengembangan olahraga daerah 2. Menyusun kalender event ajang laga olahraga daerah untuk pengembangan pariwisata dan pencitraan daerah	Jumlah klub olah raga	156	180	Program pembinaan dan pemsyarakatan olahraga	Urusan wajib Pemuda dan Olah Raga	DISPORABUDPAR
				Jumlah organisasi olah raga	30	30	Program pembinaan dan pemsyarakatan olahraga	Urusan wajib Pemuda dan Olah Raga	DISPORABUDPAR
				jumlah even/ kegiatan olah raga yang diselenggarakan	21	30	Program pembinaan dan pemsyarakatan olahraga	Urusan wajib Pemuda dan Olah Raga	DISPORABUDPAR
				Jumlah gedung olah raga	27	35	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana olahraga	Urusan wajib Pemuda dan Olah Raga	DISPORABUDPAR
				Gelanggang/balai remaja(selain milik swasta)	0	1	Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda	Urusan wajib Pemuda dan Olah Raga	DISPORABUDPAR
				Lapangan olah raga	231	250	Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Urusan wajib Pemuda dan Olah Raga	DISPORABUDPAR

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							olahraga		
				Jumlah prestasi olah raga dalam even Nasional	17	50	pembinaan dan pemsyarakatan olahraga	Urusan wajib Pemuda dan Olah Raga	DISPORABUDPAR
MISI 6 : Mengembangkan paham kebangsaan dan meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat									
6	1. Meningkatkan kesadaran wawasan kebangsaan masyarakat	6.1.1.Meningkatkan upaya pendidikan masyarakat untuk membangun kesadaran wawasan kebangsaan	6.2.1.1. Analisis stakeholder ragam organisasi/ kelompok masyarakat 6.2.1.3. Menyusun kalender even ajang forum dialog atau persaudaran antar kelompok masyarakat	Frekuensi koordinasi dan dialog antar etnis	2	10	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas
	2. Mendukung lancarnya pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden, Legislatif, dan Kepala Daerah	6.1.1.Meningkatkan upaya pendidikan masyarakat untuk membangun kesadaran wawasan kebangsaan	1. Pengembangan model pemberdayaan organiasi/kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik 2. Menyusun kalender even ajang forum dialog antar masyarakat dengan pemerintah daerah atau DPRD	Frekwensi dialog antara warga masyarakat dengan Forum Pimpinan Daerah	2	10	Program pendidikan politik masyarakat	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas
	3. Meningkatkan pembinaan politik daerah	6.1.1.Meningkatkan upaya pendidikan masyarakat untuk membangun	1. Pengembangan model pemberdayaan organiasi/kelompok masyarakat untuk	Persentase partisipasi masyarakat dalam	73,25%	75%	Program pendidikan politik masyarakat	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam	Badan Kesbangpolinmas

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kesadaran wawasan kebangsaan	berpartisipasi dalam kegiatan politik 2. Menyusun kalender even ajang forum dialog antar masyarakat dengan pemerintah daerah atau DPRD	pembinaan politik daerah				Negeri	
6	4. Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	6.1.1.Meningkatkan upaya pendidikan masyarakat untuk membangun kesadaran wawasan kebangsaan	Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik	Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan di tingkat Provinsi dan Nasional	8	15	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas
	5. Masyarakat yang hidup dengan dasar norma-norma agama.	6.2.1.Meningkatkan upaya pendidikan masyarakat agar menghidupi ajaran agama dan tidak melakukan tindak kekerasan	6.2.1.1. Analisis stakeholder organisasi/ kelompok masyarakat berbasis agama 6.2.1.2.Pengembangan model pemberdayaan organisasi/kelompok masyarakat agama untuk berpartisipasi mencukupi kebutuhan sarana prasarana ibadahnya 6.2.1.3. Menyusun kalender even ajang forum dialog atau persaudaran antar umat beragama atau jamboreantar umat	Frekuensi koordinasi dan dialog antar umat agama	2	10	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			beragama						
	6. Meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, tidak melakukan tindak kekerasan serta sadar dan tanggap bencana	<p>1..Menurunkan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban;</p> <p>2.Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum;</p> <p>3.Meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tercermin dari menurunnya jumlah gangguan keamanan dan ketertiban;</p> <p>4.Melindungi generasi muda dari bahaya penggunaan (Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA), minuman keras, penyakit HIV/AIDS, dan penyakit seksual di kalangan pemuda;</p> <p>5.Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;</p> <p>6.Melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).</p>	Persentase penurunan penyakit masyarakat	20	30	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Wajib sosial	Disnakertransos
				Angka kriminalitas yang tertangani	12,47%	13,25%	Program peningkatan	Urusan wajib Kesatuan Bangsa	Badan Kesbangpolinmas

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							keamanan dan kenyamanan lingkungan	dan Politik Dalam Negeri	
				Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4,08	7,00	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
				Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	78,54	84,62	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas
				Petugas Linmas di Kota	78,54	84,62	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas
				Jumlah Pos Kamling per jumlah Kelurahan	13	17	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketentraman, ketentraman, keindahan)	20%	50%	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas
	Meningkatnya profesionalitas aparat kamtibmas,	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum,	1..Menurunkan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban;	jumlah aparat yg mendapatkan diklat linmas/	30	45	Program peningkatan keamanan dan	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam	Badan Kesbangpolinmas Dan Satpol PP

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Pogram	Bidang urusan	SKPD
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	satlinmas, SAR, satpol PP	tidak melakukan tindak kekerasan serta sadar dan tanggap bencana	2.Meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tercermin dari menurunnya jumlah gangguan keamanan dan ketertiban;	kamtibmas/SAR/S atpol PP	53	90	kenyamanan lingkungan	Negeri	
	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan aparaturnya dan masyarakat menangani resiko korban bencana	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, tidak melakukan tindak kekerasan serta sadar dan tanggap bencana	1.Menurunkan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban, dan respon cepat akibat bencana 2.Meningkatkan kinerja Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Tersedianya Satlinmas inti penanggulangan bencana	30	90	Pencegahan dini & penanggulangan korban bencana alam	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas
				Kelengkapan sarana/prasarana penanggulangan bencana di setiap SKPD/perusahaan/ perkampungan	75%	100%	Pencegahan dini & penanggulangan korban bencana alam	Urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpolinmas
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota	1 mobil : 26.000	1 mobil : 20.000	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Program wajib perumahan	DPU
				Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100%	100%	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Program wajib perumahan	DPU

